

AGAR HARGA PANGAN STABIL

## Tahun Ini, Pemprov DKI Gelar Pasar Murah di 44 Kecamatan

JAKARTA (IM) - Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI bakal menggelar Pasar Sembako Murah di 44 kecamatan di Jakarta sepanjang 2024.

Kadis KPKP DKI, Suharini Eliawati mengatakan, program itu dijalankan untuk menstabilkan harga pangan di awal tahun.

"Minimal 44 lokasi. Ini merupakan salah satu upaya dari Pemprov DKI Jakarta dalam rangka stabilisasi harga pangan," kata Suharini saat dikonfirmasi, Jumat (20/1).

Pasar sembako murah ini juga sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri agar Pemprov DKI dapat mengendalikan inflasi. "Kemudian juga untuk memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau," kata Suharini.

Pasar sembako murah ini sebelumnya sudah digelar

di area Kelurahan Dures Sawit, Jakarta Timur dan Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Pasar murah ini menyediakan paket sembako berisi beras, minyak, gula dan terigu yang dijual kepada warga seharga Rp 100.000.

"Masyarakat cukup membayar Rp 100.000 dan dapatnya beras lima kilogram, lalu minyak goreng satu liter, gula pasir satu kilogram, lalu tepung terigu dua kilogram," ujar Suharini.

Namun, warga juga bisa membeli sembako secara eceran. Harganya satuan di pasar sembako itu lebih murah dari pasar dan warung. "Harga ketengan seperti beras empat kilogram itu Rp 50.000 kemudian gula pasir, minyak goreng dua liter harganya Rp 25.000," ucap Suharini.

Pasar sembako murah yang digelar Pemprov DKI ini bekerja sama BUMD PT Food Station Tjipinang. Program ini disambut antusias warga sekitar. ● yan

PAJAK HIBURAN NAIK 40 PERSEN

## Pekerja Klub Malam di Kemang Khawatir Di-PHK

JAKARTA (IM) - Naiknya pajak hiburan menjadi 40 persen membuat pekerja di tempat hiburan malam ketar ketir. Seorang pekerja di klub malam Kemang, Pokir Harsyah (27) khawatir kehilangan pekerjaan gara-gara pajak naik.

"Enggak setuju lah (dengan kenaikan pajak hiburan jadi 40 persen), ini lagi khawatir kena PHK gue," kata Pokir, Jumat (19/1).

Menurut dia, walaupun tidak ada PHK, pendapatan para pekerja akan berkurang. "Buset, gede juga ya (jadi 40 persen). Pasti berpengaruh ke penghasilan gue juga. Mana ada sih orang kalau sudah biasa terima segitu, terus dikurangi? Enggak ada yang mau lah," ucap Pokir.

Sejauh ini, Pokir belum merasakan dampak setelah kenaikan pajak hiburan ditetapkan. Hanya saja, dia berpendapat, persaingan akan semakin ketat apabila perusahaan mem-PHK sejumlah pekerja.

"Keuangan pasti berpengaruh, makin banyak persaingan juga. Karena, kalau pengurangan karyawan, paling yang bertahan cuma atasan-atasan, bawahannya kena PHK. Jadi, lapangan pekerjaan makin dikit pasti," tutur pria yang sudah delapan tahun terakhir bekerja di klub malam.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikkan pajak tempat hiburan di Ibu Kota yang kini menjadi 40 persen. Kebijakan ini menuai polemik. Ketentuan besaran kenaikan pajak tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Pasal 53 ayat 2, tertulis besaran pajak itu berlaku untuk tempat karaoke, diskotek, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa.

"Khusus tarif PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan sebesar 40 persen," demikian ketentuan yang tertulis beleid itu.

Kenaikan tarif pajak tempat hiburan malam di Jakarta itu berlaku sejak 5 Januari 2024. Sebelumnya, dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2015, Pemprov DKI hanya mematok pajak hiburan dari pengusaha karaoke dan diskotek sebesar 25 persen. ● yan

## BPBD DKI Klaim Tidak Ada Banjir di Jakarta

JAKARTA (IM) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebut tidak ada titik banjir di wilayahnya meskipun hujan menguyur ibu kota sejak pagi hari.

"Sejauh ini (banjir) masih nihil dari pemantauan kami," kata Kepala Kesatuan Pelaksana Pengelolaan Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Michael Sitanggang saat dihubungi di Jakarta, Jumat (19/1).

Selain itu, Michael menyebut sejumlah pintu air saat ini juga terpantau masih aman. Ketinggian air di semua pintu air masih normal. Meski terpantau tidak ada banjir, Michael memastikan sejumlah petugas BPBD DKI Jakarta sudah disiagakan di titik-titik rawan banjir di Ibu Kota.

"Masih normal semua, bisa dipantau berkala di <https://bpbd.jakarta.go.id/waterlevel/>" ujar Michael.

Sebelumnya, Michael mengatakan BPBD DKI Jakarta menyiagakan 267 petugas yang telah dibekali keahlian untuk mengevakuasi warga dalam keadaan darurat dan terdampak banjir di wilayah DKI Jakarta.

"Petugas juga telah dibekali keahlian evakuasi warga dalam keadaan darurat," kata dia sebelumnya.

Dia menyebutkan total ada 267 personel petugas penanggulangan bencana atau Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bertugas di seluruh

wilayah rawan banjir.

Tim itu bertugas menangani bencana termasuk banjir, melakukan edukasi dan mengevakuasi warga jika terjadi banjir di wilayah Jakarta serta melakukan penanganan dan pemantauan setelah bencana terjadi.

### Warga Diminta Waspada

Sementara itu, Pusdatin Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengimbau warga yang beraktivitas di Jakarta dan sekitarnya untuk mewaspadai cuaca hujan disertai angin kencang, Jumat (19/1).

"Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/pefir dan angin kencang yang dapat terjadi pada waktu siang hingga menjelang malam hari pada skala lokal di sebagian wilayah Kab dan Kota Bogor, Kota Depok," ujar Yohan petugas Pusdatin BPBD DKI Jakarta.

Meskipun demikian, BPBD DKI hingga Jumat siang belum menemukan ada genangan atau banjir signifikan yang dilaporkan oleh petugas maupun warga setempat. "Sejauh ini belum ada laporan dari wilayah dan di medsos juga belum ada laporan," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui kondisi hujan gerimis dengan intensitas ringan hingga sedang melanda sejumlah wilayah Jakarta dari Jumat tengah malam (dini hari) hingga Jumat siang. ● yan

# 4 Metropolis

FOTO: FRANS



## KPPAI BERIKAN PENGHARGAAN UNTUK POLDA METRO JAYA

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol. Suyudi Ario Seto berfoto bersama Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia di ruang kerja Wakapolda di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (19/1). KPPAI memberikan penghargaan kepada beberapa Polres di jajaran Polda Metro Jaya yang berprestasi dalam penyelesaian perkara terhadap kekerasan perempuan dan anak sekaligus sebagai upaya memperkuat kemitraan.

YANG BELUM DIRELOKASI KE RUSUN NAGRAK

## Pemprov DKI Siap Tampung Eks Warga Kampung Bayam

Kami akan membantu apabila diperlukan unit hunian untuk menampung warga yang akan direlokasi. Di Rusun Nagrak, ujar Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRK) DKI Jakarta, Afan.

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap memfasilitasi eks warga Kampung Bayam yang belum direlokasi untuk pindah ke Rumah Susun (Rusun) Nagrak. Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRK) DKI Jakarta, Afan, ketika menanggapi permintaan DPRD DKI Jakarta agar menggelar pertemuan bersama PT Jakarta Properindo (Jakpro) dan eks warga Kampung Bayam.

"DPRK akan membantu apabila diperlukan unit hunian untuk menampung warga yang akan direlokasi. Di Rusun Nagrak," ujar Afan saat dikonfirmasi, Jumat (19/1).

Selain itu, PT Jakpro selaku pengelola Kampung Susun Bayam juga selalu berkoordinasi dengan DPRK DKI Jakarta dalam penyelesaian polemik dengan eks Warga Kampung Bayam. "Jakpro selaku pemilik bangunan gedung rusun akan berkoordinasi dalam penyelesaian masalah penghunian

dengan warga," ucap Afan.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mendorong permasalahan hunian yang tak kunjung selesai ini harus dibahas kembali dengan melibatkan semua pihak. "Harus duduk bareng ketiganya. Jangan ribut tanpa ada penyelesaian. Sementara warga juga tetap tidak bisa akses rusun," ujar Ida.

Ida pun meminta Pemprov dan PT Jakpro dapat memfasilitasi pertemuan dengan eks warga Kampung Bayam terkait persoalan Kampung Susun Bayam (KSB). "Mereka ini warga DKI, hukumnya itu wajib lah untuk Jakpro dan Dinas Perumahan DKI untuk memfasilitasi warganya," pungkask dia. Belum lama ini, Jakpro mengimbau eks warga Kampung Bayam menjaga suasana kondusif selama menempati

operasional (HPPO) KSB. Eks warga Kampung Bayam diminta tidak melakukan tindakan yang melawan hukum selama berada di HPPO. Untuk mencegah kerusakan dan perbuatan melanggar hukum lainnya, Jakpro menurukan personel keamanan yang bakal berjaga di seputar HPPO.

Sebagai informasi, ada empat warga yang telah dilaporkan Jakpro, yakni Mu-

hammad Fuqron, Junardi Abdullah, Sudir, dan Komar. Laporan Jakpro teregister dengan nomor LP/B/1313/XII/2023/SPKT/Polres Metro Jakut/Polda Metro Jaya. Laporan ini bermula ketika Fuqron dan warga eks Kampung Bayam lainnya memasuki Kampung Susun Bayam (KSB) pada 29 November 2023. Mereka masuk ke dalam unit rusun dan tinggal di KSB meskipun belum mengantongi izin. ● yan

## Pagar Taman Ampera Roboh, Diduga Tak Kuat Menahan Beban Baliho

JAKARTA (IM) - Belasan alat peraga kampanye (APK) yang terpasang di pagar Taman Ampera, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, roboh. APK yang terdiri dari spanduk dan baliho itu roboh ke arah jalan raya karena pagar taman diduga tak kuat menahan beban APK.

"Kami menduga APK terlalu membebani pagar, makanya pagar itu roboh dan APK yang disangkutkan ke pagar ikut terjatuh," ujar Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jakarta Selatan, Ahmad Fahlevi saat ditemui di lokasi, Jumat (19/1).

Selain faktor APK yang terlalu membebani pagar, faktor alam disinyalir turut

ambil bagian dalam peristiwa ini. Levi menyebut, hujan angin yang terjadi pada Kamis (18/1) malam mengakibatkan pagar terangkat dari posisinya. "Jadi pagar ini kan sudah amat terbebani, ketika ada angin kencang, dia enggak kuat," tutur dia. Bawaslu Kota Jakarta Selatan telah merapkannya agar APK tak mengganggu arus lalu lintas.

"Kami rapikan sejak pukul 07.00 WIB, tapi kami masih menunggu perwakilan dari partai politik, karena ada spanduk yang masih menempel di pagar. Sementara teman-teman Dinas Pertamanan ingin mencopot pagar untuk dibenarkan," imbuh dia. ● yan

## Pemprov DKI Jakarta Bakal Bangun 4 JPO Baru Tahun Ini

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membangun empat jembatan penyeberangan orang (JPO) pada 2024.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo menjelaskan, JPO tersebut menurut rencana bakal di bangun di Jalan Danau Sunter Barat, Jalan Mas Mansyur, PGC Cililitan, dan Jalan Pondok Gede. JPO dibangun untuk menindaklanjuti hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dan masukan dari masyarakat.

"Keempat JPO yang akan dibangun didesain dengan nuansa modern dan semenarik mungkin, serta mengusung kearifan lokal," ujar Heru dalam keterangannya, Jumat (19/1).

Menurut Heru, JPO di

empat lokasi tersebut diperlukan untuk melengkapi fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, sekaligus meminimalisasi kecelakaan. Nantinya, JPO yang dibangun akan memiliki lebar tiga meter dan diupayakan ramah penyandang disabilitas, ibu hamil, serta lanjut usia (lansia).

"Jadi secara keindahan enak dipandang dan bisa mengakomodasi penyandang disabilitas, tata pencahayaan juga ada dan beberapa pakai lift," ungkap Heru.

Adapun pembangunan fisik keempat JPO tersebut menurut rencana bakal dimulai paling lambat Mei 2024. Desain keempat JPO itu sudah selesai sejak 2023 dan kini memasuki tahap perencanaan konstruksi. "Pembangunan fisik mungkin di bulan April atau Mei 2024," kata Heru. ● yan

## DPRD DKI Bakal Panggil Manajemen Transjakarta Buntut Ganti Nama Halte

JAKARTA (IM) - Pimpinan DPRD DKI Jakarta berencana memanggil manajemen PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) terkait langkah penggantian nama halte di Ibu Kota. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pemanggilan dilakukan untuk meminta penjelasan PT Transjakarta soal penggantian nama-nama halte. Sebab, manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta itu disebut tak berkomunikasi dengan DPRD soal pengambilan kebijakan tersebut.

"Itu enggak ada komunikasi dengan DPRD. Nanti saya panggil untuk klarifikasi," ujar Prasetyo dalam keterangan resminya, Jumat (19/1).

Prasetyo tidak menjelaskan secara terperinci kapan pemanggilan akan dilakukan. Dia hanya mengatakan bahwa PT Transjakarta seharusnya berdiskusi dulu dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, sebelum memutuskan perubahan nama halte.

Sebab, kebijakan ini dikhawatirkan berdampak pada aktivitas masyarakat yang sudah familier dengan nama-nama halte Transjakarta sebelumnya.

"Ya harusnya disosialisasikan, ngobrol sama dewan, tupoksinya Komisi B. Ajak berunding, nanti Komisi B lapor ke ketua dewan untuk memutuskan apakah layak atau tidak," pungkask Prasetyo.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah halte Transjakarta mengalami perubahan nama.

Alasannya terkait penjualan hak penamaan atau naming right halte. Halte yang selama ini berupa nama bangunan atau instansi, diubah menjadi nama kelurahan atau daerah.

Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza mengatakan, perubahan nama halte ini dilakukan secara bertahap dan menjadi nama halte yang netral.

"Kami saat ini bertahap melakukan terutama yang direvitalisasi kita lakukan netralisasi terkait penamaan. Jadi yang sebelumnya ada nama perusahaan tertentu atau yang sifatnya komersial, kami netralisasi menjadi nama daerah setempat," ujarnya saat ditemui di Halte Tosari, Jakarta, Selasa (19/12/2023) lalu. ● yan



## SUBSIDI SEKTOR ENERGI NAIK 28 PERSEN

Pekerja merapikan tabung gas LPG 3 kg di pangkalan LPG, Jakarta, Jumat (19/1). Kementerian ESDM mematok target subsidi sektor energi sebesar Rp186,9 triliun pada 2024 yang meningkat 28 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan rincian Rp113,3 triliun untuk subsidi BBM dan LPG, serta Rp73,6 triliun untuk subsidi energi.

**PENGUMUMAN**  
Untuk memenuhi persyaratan dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi PT KUDA PACU INDONESIA berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan telah menerima pengembalian oleh PT SARGA KAPITAL INVESTAMA. Pengembalian tersebut telah mendapat persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan dan telah berlaku efektif sejak tanggal 18 Desember 2023.  
PT Kuda Pacu Indonesia Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 50 Unit C Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta  
Jakarta, 20 Januari 2024  
Direksi PT Kuda Pacu Indonesia

**PENGUMUMAN**  
Untuk memenuhi persyaratan dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi PT ARENA PACU NUSANTARA berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan telah menerima pengembalian oleh PT SARGA KAPITAL INVESTAMA. Pengembalian tersebut telah mendapat persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan dan telah berlaku efektif sejak tanggal 18 Desember 2023.  
PT Arena Pacu Nusantara Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 50 Unit C Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta  
Jakarta, 20 Januari 2024  
Direksi PT Arena Pacu Nusantara